

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DAK TERHADAP BELANJA LANGSUNG

Dewi Solichah

*Solichah.Dewi@yahoo.co.id*

Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research is aimed to find out whether the local own source revenue, general allocation fund, specifics allocation fund to the direct expenditure all districts / cities in East Java Province. The population is all districts/cities in East Java province. The sample collection technique has been done by using purposive sampling method and the samples are 35 districts/cities in East Java province. The secondary data has been obtained from the audit board of the Republic of Indonesia East Java province representative. The research analysis is the multiple linear regressions analysis which has been carried out by using SPSS program to examine local own source revenue, general allocation fund, specifics allocation fund give positive influence to the direct expenditure. The result of this research shows that local own source revenue, general allocation fund, specifics allocation fund give positive influence to the direct expenditure.*

*Keywords: Local own sources revenue, general allocation fund, specifics allocation fund, direct expenditure*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan jumlah sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Menggunakan data sekunder dari instansi BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur. Analisis penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS digunakan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja langsung berpengaruh positif. Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Langsung.

### PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga tercapainya kesejahteraan. Menurut Bastian (2010:5) organisasi sektor publik mempunyai banyak aspek dimana salah satunya adalah keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik telah terbukti memiliki peranan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi sektor publik. Untuk mengontrol penggunaan dana publik, dapat dilakukan dengan cara menyusun anggaran. Dalam sektor publik disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah.

Perubahan dari sistem sentralisasi dimana segala kekuasaan pemerintahan yang dipusatkan di pemerintah pusat, berubah menjadi sistem desentralisasi dimana penyerahan atau perpindahan wewenang pemerintahan ke pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang sebagai

penganti dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah dapat merencanakan atau memprogram kebijakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebab yang mengetahui kurang dan kelebihan daerah tersebut adalah daerahnya sendiri. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional. Pemerintah subnasional yaitu tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam satuan negara. Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, supaya mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Sehingga antar daerah mendapatkan DAU yang berbeda-beda karena harus dialokasikan berdasarkan besar kecilnya alokasi dasar dan *celah fiskal*. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sedangkan *celah fiskal* merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

Dana Alokasi khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional. Pertumbuhan ekonomi perlu dipercepat sehingga membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai.

Belanja daerah merupakan pengurangan nilai kekayaan bersih atau pengeluaran uang kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (dalam Syamni *et al.*, 2014) belanja daerah dibagikan kedalam dua bagian, yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah dan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) bertujuan tercapainya tugas pemerintah dalam memberikan kebutuhan fasilitas publik.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya penelitian Hidayati (2015) yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung dengan studi empiris pada Kabupaten/Kota di Pulau Madura. Dengan periode penelitian dari tahun 2004-2014 kecuali tahun 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan DAU berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan PAD dan DAK tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja langsung. Penelitian Indraningrum (2011) yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi

Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung dengan studi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan periode penelitian dari tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan penelitian Menurut Syamni *et al.*, (2014) yaitu Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara. Dengan periode penelitian 1982-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan Asli Daerah dengan belanja langsung di Aceh Utara menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, semakin besar belanja langsung oleh daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur.

## TINJAUAN TEORETIS

### Otonomi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berbunyi otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan secara luas dan bertanggungjawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, dalam bentuk uang atau SDA. Mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonomi, pasal 18 A (2) undang-undang dasar 1945 (dalam Bastian, 2010:47) menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 31 Tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditentukan dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari 1) Pendapatan antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, 2) Belanja antara lain belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer, dan 3) pembiayaan antara lain penerimaan daerah, dan pengeluaran daerah. APBD di susun sesuai kebutuhan dan keperluan pemerintahan daerah tersebut untuk tercapainya tujuan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian unit kerja, yakni dalam program kinerja anggaran dapat dijalankan secara efektif dan efisien dan merupakan alat untuk memotivasi agar tercapainya visi organisasi.

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber PAD terdiri: (1) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan terhadap daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah.

### **Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, tujuan DAU adalah untuk : a) *horizontal equity* dan b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sedangkan menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*) terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*.

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung**

Kemampuan daerah dalam menyediakan dana yang bersumber dari daerah sendiri tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada pada daerah tersebut untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. PAD memiliki peran cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Dikarenakan sistem desentralisasi maka pemerintah daerah wajib untuk memajukan kesejahteraan rakyat, menjaga dan memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung (Indraningrum, 2011). Dalam penelitian Menurut Syamni *et al.* (2014) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu  $F_{hitung}$  sebesar 113,318 yang lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,975 sehingga secara empiris telah terbukti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan menurut Hidayati (2015) sebaliknya bahwa PAD tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja langsung, dimana  $t_{hitung}$  sebesar 0,936 dengan tingkat signifikan sebesar 0,358 karena signifikan  $t < \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

$H_1$  : Pendapat Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung**

DAU merupakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berasal dari dana transfer pemerintah pusat. DAU dialokasikan kepada daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2015) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung, dimana  $t_{hitung}$  sebesar 2,593 dengan tingkat signifikan sebesar 0,015 karena signifikan  $t < \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak. Hal ini sama dengan hasil penelitian dari Indraningrum (2011) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

$H_2$  : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah yang sesuai dengan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah. Contohnya pembangunan puskesmas di daerah, pembangunan sekolah di daerah, dan untuk memperbaiki jalan yang rusak.

DAK dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Dari fungsi DAK, bahwa DAK lebih difokuskan untuk pengelokasian belanja modal suatu daerah. Dalam anggaran belanja modal, DAK berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan teori Konsumsi Keynes yaitu Konsumsi meningkat apabila pendapatan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2013) menjelaskan bahwa hasil pengujian membuktikan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang kuat terhadap belanja modal, karena dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu. Sedangkan menurut Hidayati (2015) menjelaskan bahwa hasil pengujian statistik tidak terbukti bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

$H_3$  : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2008:8). Populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, menggunakan laporan realisasi anggaran pada tahun 2011-2015. Metode penelitian ini termasuk metode deskriptif yaitu kejadian yang terjadi pada masa sekarang untuk diteliti.

### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi (Sugiyono, 2008). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* supaya pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menyajikan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2011-2015 secara lengkap (2) Laporan Realisasi APBD yang sudah di audit oleh BPK.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*Secondary Data*). Sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung atau dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat oleh peneliti dan diolah lebih lanjut. Seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2011-2015. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah keterangan tertulis yang dimiliki oleh instansi, sesuai dengan penelitian ini maka instansinya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen (terikat) dan empat variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini definisi dari pengukuran variabel yakni:

#### Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah menyebutkan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Variabel belanja langsung diukur dengan :

$$\text{Belanja Langsung} = \text{belanja pegawai} + \text{belanja barang dan jasa} + \text{belanja modal}$$

#### Pendapatan Asli Daerah

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

#### Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dilihat dari dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD. Data yang digunakan adalah data realisasi DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

## Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data yang digunakan adalah data realisasi DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 23. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Secara administrative terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* sehingga dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur didapatkan 35. Tiga daerah yang tidak termasuk adalah Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2014-2015, Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2014, dan Kota Madiun tahun anggaran 2015.

### Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	175	30242.0	4249388.0	293475.731	579603.3465
DAU	175	65441.0	1613162.0	779671.206	287059.0162
DAK	175	424.0	204577.0	63634.720	33107.0387
BL	175	243988.0	9258230.0	1408676.063	1007028.4879
ValidN(listwis)	175				

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Pada hasil tabel 1 diatas Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki nilai minimum sebesar Rp 30.241.864.301 adalah Kota Batu pada tahun 2011. Kota yang mempunyai nilai maksimum sebesar Rp 4.249.387.555.525 adalah Kota Malang pada tahun 2015. Selama tahun 2011-2015 berdasarkan data diatas nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 293.475.000.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 579.603.000.000 Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 65.441.227.800 adalah Kota Ngawi pada tahun 2011. Kota yang mempunyai nilai maksimum sebesar Rp 1.613.161.777.000 adalah Kota Malang pada tahun 2015. Selama tahun 2011-2015 berdasarkan data diatas nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 779.671.000.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 287.059.000.000 Dana Alokasi Khusus memiliki nilai minimum sebesar Rp 424.100.000 adalah Kota kediri pada tahun 2012. Kota yang mempunyai nilai maksimum sebesar Rp 204.576.570.000 adalah

Kota Sampang pada tahun 2015. Selama tahun 2011-2015 berdasarkan data diatas nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 63.634.000.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 33.107.000.000 Belanja Langsung memiliki nilai minimum sebesar Rp 243.988.354.559 adalah Kota Ngawi pada tahun 2013. Kota yang mempunyai nilai maksimum sebesar Rp 9.258.230.4988.515 adalah Kota Mojokerto pada tahun 2014. Selama tahun 2011-2015 berdasarkan data diatas nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 1.408.676.000.000 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 1.007.028.000.000.

### Hasil Rincian Data Outlier

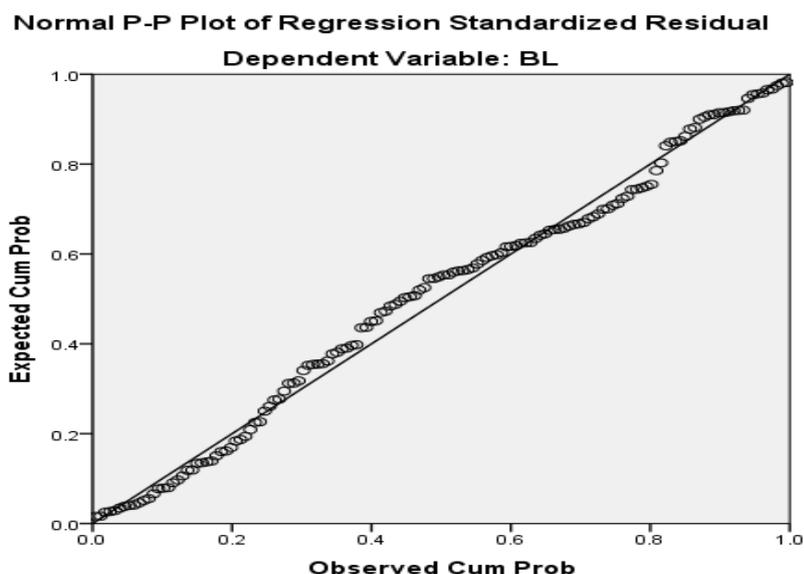
Setelah dilakukan *screening* data, maka diketahui terdapat data outlier pada penelitian. Data outlier adalah data yang mempunyai karakteristik unik. Agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian ini, maka data outlier dalam peneliti di keluarkan dari sampel. Hasil rincian data outlier yang tidak digunakan sampel dalam penelitian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rincian Data Outlier**

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Kab. Banyuwangi	5.30			2.73	3.61	3
Kab. Bojonegoro		2.52	2.40	3.70	4.37	4
Kab. Bondowoso					2.41	1
Kab. Gresik		-3.02		-2.05	-2.05	3
Kab. Jember					-2.58	1
Kab. Kediri	2.20					1
Kab. Malang					3.08	1
Kab. Mojokerto				11.23		1
Kab. Nganjuk				-2.80		1
Kab. Ngawi	3.52		-5.40			2
Kab. Pamekasan			-2.19	-2.26		2
Kab. Pasuruan					2.06	1
Kab. Sidoarjo			-2.12			1
Kab. Situbondo	1.969					1
Kab. Trenggalek			-4.19			1
Kab. tulungagung		2.02		-2.09	-2.17	3
Kota Kediri				-2.08		1
Kota Malang		2.06			-4.57	2
Kota Surabaya	2.91					1
<b>Jumlah</b>						<b>31</b>

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas



Sumber: Data sekunder diolah, 2017

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas Data Grafik P-Plot Setelah Outlier**

Dengan hasil Dari gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* tersebut dapat terlihat bahwa plot data berada dan menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal. Untuk memperkuat kesimpulan pengujian distribusi normal menggunakan uji stastistik yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas Data Kolmogorov Smirnov Test setelah outlier**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	58145.11089755
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.048
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Analisis uji statistik Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) menggunakan bantuan SPSS versi 23 diketahui bahwa bahwa asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 atau probabilitas di atas 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ) maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.670	1.493
DAU	.473	2.115
DAK	.547	1.827

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai *Tolerance* dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,670, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,473, dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,547. Ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai *Tolerance* > 0,10. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Begitu juga dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada tabel di atas. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 1,493, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,115, dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,827. Karena ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai VIF < 10, maka hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.

## Uji Autokolerasi

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 <sup>a</sup>	.995	.995	58764.7921	1.742

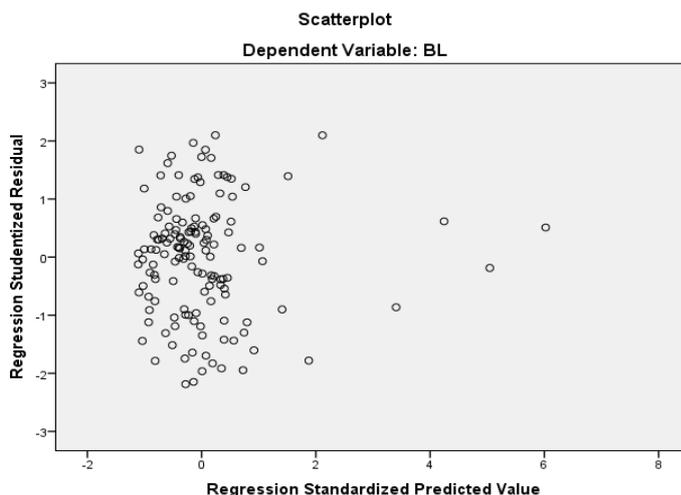
a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Pada tabel di atas, nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,742 (terletak antara -2 sampai +2), maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi adanya autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data sekunder diolah, 2017

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot**

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik *Scatterplot*. Berdasarkan grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	20790.209	14666.533		1.418	.159
PAD	1.213	.012	.773	105.245	.000
DAU	1.119	.026	.381	43.614	.000
DAK	1.991	.210	.077	9.487	.000

a. Dependent Variable: BL  
Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Dari tabel yang menunjukkan hasil dari analisis regresi berganda di atas, dapat disusun fungsi atau persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$BL = 20790.209 + 1.213 \text{ PAD} + 1.119 \text{ DAU} + 1.991 \text{ DAK} + e$$

**Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	95060609618186.800	3	31686869872728.934	9175.821	.000 <sup>b</sup>
Residual	483462110744.231	140	3453300791.030		
Total	95544071728931.030	143			

a. Dependent Variable: BL

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Dari hasil pengujian kelayakan model regresi (*goodness of fit*) yang telah disajikan pada tabel ANOVA diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 9175.821 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 <sup>a</sup>	.995	.995	58764.7921

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi dari nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0.995 berarti 99.5% perubahan belanja langsung dapat dijelaskan oleh variansi variabel bebas yaitu PAD, DAU, dan DAK sedangkan sisanya 0.5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimaksutkkan kedalam penelitian ini.

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)**

**Tabel 9**  
**Hasil Analisis Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficien		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	20790.209	14666.533		1.418	.159
PAD	1.213	.012	.773	105.245	.000
DAU	1.119	.026	.381	43.614	.000
DAK	1.991	.210	.077	9.487	.000

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas nilai sig. dari masing-masing variabel independen, yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,000, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,000, dan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,000. Ketiga

variabel independen tersebut semua memiliki  $sig < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut pengaruh secara signifikan terhadap belanja langsung.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung**

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 105.245 dengan nilai  $sig$  sebesar 0.000. karena nilai  $sig$   $0.000 < 0.05$  dan berpengaruh positif, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung (BL). Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang didapat oleh suatu daerah tersebut tinggi, maka semakin tinggi juga dana yang dikeluarkan untuk membiayai Belanja Langsung. Dan sebaliknya apabila PAD yang didapat oleh suatu daerah kecil, maka dana yang dikeluarkan untuk Belanja Langsung kecil juga. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi suatu daerah karena sebagai sumber-sumber pendapatan masukan yang akan digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran yang ada selama satu periode anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian pada Hidayati (2015) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung pada tiga Kabupaten di pulau Madura. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syamni *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara. Dan juga sejalan dengan penelitian Indraningrum (2011) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung**

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung dari variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 43.614 dengan nilai  $sig$  sebesar 0.000. Karena nilai  $sig$   $0.000 < 0.05$  dan berpengaruh positif, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung (BL). Hal ini menunjukkan bahwa DAU yang diterima suatu daerah semakin tinggi, maka semakin tinggi juga dana yang dikeluarkan untuk Belanja Langsung. Dan sebaliknya apabila DAU yang diterima suatu daerah kecil, maka dana yang dikeluarkan untuk Belanja Langsung kecil juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian pada Hidayati (2015) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung pada 3 Kabupaten di pulau Madura. Dan juga hasil penelitian dari Indraningrum (2011) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung**

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung dari variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 9.487 dengan nilai  $sig$ . sebesar 0.000. karena nilai  $sig$ .  $0.000 < 0.05$ , maka DAK berpengaruh terhadap Belanja Langsung dan nilai  $sig$ . positif. maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung (BL). Hal ini menunjukkan bahwa DAK yang diterima suatu daerah Provinsi Jawa Timur semakin tinggi, maka semakin tinggi juga dana yang dikeluarkan untuk Belanja Langsung dan sebaliknya. DAK berpengaruh terhadap belanja langsung dapat disebabkan karena kurangnya kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomis untuk dapat mendanai kegiatan sendiri urusan daerahnya, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar daerah Jawa Timur yang belum merata sepenuhnya. Meskipun telah ada peningkatan perkembangan dari tahun sebelum-sebelumnya. Sehingga dibutuhkan dana selain PAD dan DAU untuk dapat mendanai kegiatan khusus urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktora dan Pontoh (2013)

menjelaskan bahwa hasil pengujian membuktikan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang kuat terhadap belanja modal. Karena dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu. Sebab DAK lebih difokuskan untuk pengelokasian belanja modal suatu daerah dan belanja modal termasuk dalam belanja langsung. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian pada Hidayati (2015) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada tiga Kabupaten di pulau Madura tahun anggaran 2004-2014 kecuali tahun 2006.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung tahun realisasi anggaran 2011-2015 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung. PAD yang didapat oleh pemerintah daerah tersebut tinggi, maka dana untuk membiayai belanja langsung tinggi juga. Semakin pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber ekonomis daerahnya dengan baik, semakin mungkin daerah tersebut untuk dapat membiayai pengeluaran belanjanya sendiri tanpa harus tergantung oleh dana transfer pemerintah pusat, 2) DAU berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Berarti bahwa DAU yang diterima suatu daerah semakin tinggi, maka semakin tinggi juga dana yang dikeluarkan untuk Belanja Langsung dan sebaliknya. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa ada peningkatan DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun ketahun. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PAD di Propinsi Jawa Timur setiap tahunnya tidak membuat dana transfer dari Pemerintah turun melainkan sama pada setiap tahunnya ada kenaikan. Karena DAU tidak terdapat batasan mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan, sehingga dapat menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika dana diupayakan untuk perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat daerah tersebut untuk mengurangi pengangguran, dan 3) DAK berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Berarti DAK yang diterima suatu daerah Provinsi Jawa Timur semakin tinggi, maka semakin tinggi juga dana yang dikeluarkan untuk Belanja Langsung dan sebaliknya. DAK berpengaruh terhadap belanja langsung dapat disebabkan karena kurang mampunya suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomis untuk dapat mendanai kegiatan sendiri urusan daerahnya, dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar daerah Jawa Timur yang belum merata sepenuhnya, Meskipun telah ada peningkatan perkembangan dari tahun sebelum-sebelumnya. Sehingga dibutuhkan dana selain PAD dan DAU untuk dapat mendanai kegiatan khusus urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

### **Saran**

Dari hasil pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tingkat ketergantungannya masih tinggi pada dana pusat diharapkan agar dapat meningkatkan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut untuk menurunkan ketergantungan pada pemerintah pusat, dan (2) Bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk lebih luas dalam objek penelitian dan waktu yang lebih panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga*. Erlangga. Jakarta.
- Hidayati, N. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Indraningrum, T. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Oktora F. E. dan W. Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability* 2(1) :9
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.15 Mei 2006. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 31 Tahun 2016 *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*.7 Juni 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 *Dana perimbangan*.10 Nopember 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Syamni, G., Z. Husodo dan Syarifuddin. 2014. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Kebangsaan* 3(5):11
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4438. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Nomor 14 Tahun 2015 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016*. Jakarta.